

BAB IV

SIMPULAN

Bersumber dari penjabaran dan pembahasan tentang tinjauan atas belanja barang pada Pemerintah Kota Binjai yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sekaligus sebagai hasil dari tinjauan yang penulis, bahwasannya:

1. Pemerintah kota Binjai mengklasifikasikan belanja menjadi dua, yaitu belanja yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya akan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), diluar dari pada itu akan dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Maksud diluar dari menurut jenis ialah berasal dari pengelompokkan fungsi ataupun penjelasan-penjelasan lainnya yang tidak dapat diungkapkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. LRA serta LAK menggunakan pengelompokkan jenis yang terdiri dari tiga poin, belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga, yang mana belanja barang dan jasa termasuk ke belanja operasional.
2. Penerapan akuntansi belanja barang pada Pemerintah Kota Binjai tahun 2020 tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri No. 64 Tahun 2013 untuk pengakuannya, yaitu diakui ketika terjadi pengeluaran melalui RKUD atau BUD. Untuk Pengukuran, PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menggunakan asas bruto,

penyajianya dilakukan pada LRA dengan format mengikuti Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, serta belanja yang tidak dapat disebutkan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akan dimunculkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Guna mempertegas kesesuaian tersebut, penerapan kebijakan Pemerintah Kota Binjai tercantum dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas.

3. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, Pemerintah Kota Binjai tidak terlalu melakukan *Treatment* khusus pada belanja barang dan jasa selama masa pandemi, dikarenakan pandemi tidak terlalu berdampak signifikan ke Pemerintah Kota Binjai. Sebagai contoh, anggaran belanja barang hanya berkurang paling banyak 7%. Sebenarnya pengurangan belanja ini berkurang akibat efek pandemi, beberapa pelayanan tidak dapat berjalan dengan lancar.
4. Tidak ada hal yang sangat berdampak langsung terhadap dampak dari kebijakan belanja selama pandemi pada belanja barang, sebagai contoh realisasi belanja yang hanya menurun sebesar 1-2% dari tahun sebelumnya dan dari yang dianggarkan.